

KONSEP DIRI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD – RI) PADA KONTEKS KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

Teuku Yuliansyah

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan

Email: teuku.yuliansyah@unpas.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is multicultural, which means that it does not only recognize the plurality of certain ethnic groups or cultures, but also emphasizes equality between these cultures. The existence of ethnicity should be considered as the nation's essential wealth that can be used to form social relations, to enrich the nation's cultural assets. In this case, multiculturalism accommodates two (2) things that are contradicted, namely 'Difference' and 'Equality'. Thus, despite the high level of heterogeneity, "vertical and horizontal conflicts", can be reduced because each culture is given the freedom to show its identity and carry out life more autonomously while getting equal recognition of the existence and uniqueness of each. This is the reason why this research was conducted at State Institutions such as DPD – RI.

The purpose and objective of this research is to explore opinions and get a general idea of how the strategy of DPD – RI Members to construct their self - concept based on their region of origin in the context of intercultural communication.

This study uses a qualitative method with a constructivist paradigm that focuses on Alfred Schutz's tradition of social phenomenology, which is associated with the concept of symbolic interaction.

The results showed that there were three (3) self - concept models of the informants, namely: the conservative model; adaptive; interactive, based on three (3) classification, namely: motive – adaptation – interaction.

The conclusion obtained is that the scope of the informant's self-concept is not limited to social and political communication, but is closely related to intercultural communication. The slogan “Bhinneka Tunggal Ika” has become a symbol of intercultural communication for DPD – RI members as the end result of how they interpret their self - concept.

Keywords : DPD – RI, Self - Concept, Phenomenology, Culture.

I. Pendahuluan

Keberagaman kebudayaan adalah sebuah potensi sekaligus *puzzle* yang senantiasa menuntut penyelesaian masalah. Setiap keunikan atau sesuatu yang menyiratkan suatu kekhasan suatu daerah pada dasarnya adalah kekayaan. Konsepsi Indonesia yang multikultural selainnya

bukan hanya pada tataran fisik saja tetapi juga pada tingkat kesadaran. Dengan kenyataan semacam inilah maka tanggungjawab yang besar menghadang kita, bagaimanakah caranya agar kemajemukan budaya dan heterogenitas sosial ini dapat diakomodasi sedemikian rupa sehingga menjadi modal bangsa ini dalam mengemas aset kebudayaan yang luar biasa ini.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD - RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD - RI sebagai lembaga perwakilan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini dibentuk melalui perubahan (amandemen) ketiga Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR - RI) pada tanggal 9 November 2001. Gagasan dasar pembentukan DPD - RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Selain itu, keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR - RI sebelum perubahan UUD 1945 dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Dari sisi lain, peneliti mencermati adanya variasi dalam adaptasi, interaksi dan perilaku atas pemakaian komponen - komponen budaya ini, baik dengan sesama Anggota DPD - RI ataupun bukan. Ada kesan yang ingin disampaikan dan ditonjolkan ialah bahwa Anggota DPD - RI “lebih pantas” memakai simbol - simbol daerah tersebut dibanding dengan para Anggota DPR - RI yang dipilih bisa saja tidak dari daerah asal pemilihan mereka saat pemilu legislatif lalu dikarenakan pola rekrutmen yang berbeda dari lembaga legislatif. Atau bila ada Anggota DPD - RI terpilih yang etniknya bukanlah etnik asli dari daerah pemilihannya, lalu hal apa yang membuat ia terpilih. Walaupun periode jabatan sudah berganti, namun peneliti yakin bahwa tema penelitian ini masih relevan, dikarenakan persyaratan menjadi Anggota DPD - RI periode 2019 - 2024 masih sama. Hal ini tentu menambah kompleks variasi konsep diri beserta

pemaknaan dari anggota legislatif tersebut. Sehingga peneliti berkeyakinan bahwa hal ini menarik untuk dijadikan topik atau tema penelitian, tentunya dalam konteks komunikasi antarbudaya. Penelitian ini mencoba hadir dengan tujuan memberikan deskripsi tentang bagaimana konsep diri Anggota DPD - RI dalam memaknai pengalaman mereka, pada konteks komunikasi antarbudaya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan tradisi fenomenologi sosial Alfred Schutz yang fokus pada hal - hal tentang bagaimana anggota masyarakat menggambarkan dunia kesehariannya, khususnya tentang bagaimana individu secara sadar mengembangkan makna dari hasil interaksinya dengan orang lain (Cresswell, 1998:53).

Dari sisi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu inovasi pada ilmu komunikasi antarbudaya, khususnya tentang kajian berbagai perilaku yang tampak dan disengaja, dikarenakan kompleksnya makna konsep diri yang dimiliki oleh para Anggota DPD - RI / MPR - RI dari sisi sosial, politik, dan budaya.

Subyek penelitian dilakukan terhadap 7 (tujuh) Anggota DPD - RI. Subyek penelitian yang berjumlah 7 orang ini, peneliti anggap sudah mewakili 4 (empat) komite kerja DPD - RI [(Relevan dengan komisi yang berjumlah 11 (Sebelas) di DPR - RI)].

Dalam hal lokasi penelitian, Cresswell mengemukakan bahwa informan dalam penelitian fenomenologi dapat berada pada satu lokasi (*single site*) (Cresswell, 1998:111). Penelitian ini dilaksanakan terhadap para informan yang merupakan Anggota DPD - RI / MPR - RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Fenomenologi

Istilah fenomenologi untuk pertama kalinya digunakan oleh J.H. Lambert (1728 – 1777), dalam tulisannya “*Neues Organon*” (1764). Kemudian istilah itupun dipakai oleh Immanuel Kant, Hegel, dan sejumlah filsuf lainnya. Fenomenologi memiliki arti serba berbeda. Pada perkembangannya, fenomenologi menjadi terkenal setelah Edmund Husserl (1859 – 1938) menggunakannya sebagai metode berpikir tepat yang khusus, yang lepas dari segala prasangka metafisis (Bakker, 1986).

Secara mendasar, fenomenologi merupakan studi tentang pengetahuan yang berangkat dari kesadaran atau mengalami cara dimana kita mulai memahami kehadiran objek dan peristiwa dengan mengalaminya secara sadar (Littlejohn, 2002:184). Fenomenologi fokus pada penggalian struktur kesadaran di dalam pengalaman individu (Polkinghorne dalam Cresswell, 1998:51). Di dalam fenomenologi, komunikasi dilihat sebagai pengalaman personal yang dibagi dengan orang lain melalui interaksi tatap muka (Craig dalam Littlejohn, 2002:13). Di samping itu, fenomenologi turut dipandang bukan sekedar ilmu, tetapi sebagai metode pemikiran (*a way of looking at things*). Sehingga di dalamnya tidak ada teori, tidak ada hipotesis dan tidak ada sistem (Bouwer dalam Hasbiansyah, 2008:166).

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomenologi dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia

mengkonstruksi makna dan konsep – konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektivitas karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang dapat kita telusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain di dalamnya (Kuswarno, 2009:2).

Secara spesifik, Schutz diakui telah mengartikulasikan esensi fenomenologi dalam mengkaji tindakan sosial (Swingewood dalam Cresswell, 1998:53). Melalui karyanya, “*Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt*” (*The Meaningful Structure of The Social World*), Schutz berusaha menunjukkan hubungan diantara fenomenologi transedental oleh Husserl dan *Verstehende Soziologie* yang dikemukakan Weber (Zeitlin, 1995:259).

Secara garis besar, Schutz mengajukan 3 asumsi fundamental dalam dunia kehidupan sehari – hari. *Pertama*, setiap dari kita berasumsi bahwa realitas bersifat konstan dimana dunia tetap tampak sebagaimana aslinya. *Kedua*, pengalaman kita tentang dunia merupakan sesuatu yang bersifat *valid* (absah), artinya setiap dari kita percaya bahwa segala yang kita lihat merupakan sesuatu yang akurat. *Ketiga*, bahwa setiap dari kita melihat diri kita memiliki kekuatan untuk bertindak dan menyelesaikan berbagai hal untuk mempengaruhi dunia (Littlejohn, 2002:186).

Schutz mengemukakan 2 (dua) motif sebagai dasar bagi tindakan manusia. *Pertama*, “*in order to motive*” (motif yang menjadi tujuan) yang merupakan gambaran mental atas sebuah tujuan yang hendak diraih individu (Infante, *et.al.*, 1993:79). Motif ini dipahami dalam upaya menganalisis tindakan bermakna dalam konteks *internal time consciousness*, dimana setiap tindakan

(*action*) diarahkan pada sebuah proyek yang diorientasikan pada tujuan / kesatuan tindakan (*act*) sebagaimana ditempatkan pada *future perfect tense* (Schutz, 1972:87). Sebuah tindakan dipandang mengandung *in order to motive* sepanjang ia dilihat sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan sebagai sebuah proyek untuk mencapai tujuan (kesatuan tindakan) (Schutz, 1972:88).

Kedua, “*because of motive*” (motif menjadi suatu sebab) yang merujuk pada suatu keadaan di masa lalu (Zeitlin, 1995:270). Motif ini berusaha menjelaskan proyek dalam konteks pengalaman masa lalu aktor (Schutz, 1972:91). Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memperoleh pemahaman atas *because motive* sedikit banyak diperlukan perbandingan dengan motif sebelumnya, yaitu *in order to motive*. Dalam hal ini, *in order to motive* dicirikan oleh peran proyek sebagai faktor pendorong, dimana proyek tersebut mendorong dilakukannya tindakan – tindakan (*actions*) tertentu. Sementara itu, pada (*genuine*) *because motive*, pengalaman masa lalu sebelum proyek tersebut dilakukan menjadi faktor pendorong bagi dibentuknya sebuah proyek untuk mencapai tujuan (Schutz, 1972:92). Sehingga, dapat dikatakan bahwa sementara *because motive* mendorong dimunculkannya sebuah proyek, *in order to motive* mendorong terwujudnya suatu tujuan (*act*) melalui proyek sebagai dasarnya.

Dalam kaitannya dalam konteks komunikasi antarbudaya, Schutz berpendapat, “Setiap orang mempunyai suatu sistem pengetahuan dari budayanya masing – masing berupa realitas yang tak pernah dipersoalkan lagi. Realitas ini menyediakan skema interpretif bagi seseorang untuk menafsirkan tindakannya dan tindakan orang lain. Sistem makna kultural antara lain merupakan aturan budaya (*cultural rules*) dan tema nilai (*value themes*)”.

Konsep Diri

Terkait dengan konsep diri. bagi Dusek (1996 :142) konsep diri merupakan salah satu bagian dari sudut pandang tentang diri (*self - views*) sebagaimana diyakini para ahli psikologi saat ini. Baginya, *self-views* terdiri atas konsep diri (*self - concept*), harga diri (*self - esteem*) dan identitas (*identity*).

Pembicaraan tentang konsep diri tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang diri (*self*) mengingat diri merupakan kompleksitas yang tersusun atas berbagai pandangan, termasuk konsep diri. Dari segi sejarah, William James merupakan psikolog pertama yang mencoba menguraikan konsep diri secara lebih mendalam dan mampu menjadi penanda penibahan cara berpikir secara lebih baru (dibanding pendahulu-pendahulunya) terhadap konsep diri (Burns, 1993:6). Sudut pandang yang ditawarkan James tersebut berangkat dari berbagai konsepsi dan paparan tentang diri (*self*).

Dalam bahasa James, diri yang global dipandang sebagai “*I*” dan “*Me*” yang berlangsung bersamaan (Burns, 1993:8). “*I*” merujuk pada pandangan diri sebagai subjek, sedangkan “*Me*” merujuk pada pandangan diri sebagai objek. Lebih jauh, diri yang meliputi kedua dimensi tersebut terdiri atas 4 komponen yang selalu berkaitan dengan harga diri (*self - esteem*).

Sementara itu, senada dengan Burns, Beebe et.al. (1996:40) meyakini bahwa jumlah *social self* yang dimiliki seseorang sebanding dengan jumlah orang-orang yang mempunyai ikatan (relasi) sosial dengan orang tersebut. Demikian pula dengan

spiritual *self* yang setara dengan diri spiritual dalam bahasa Burns.

Perspektif Interaksionisme Simbolik

Selain dipandang dari segi dimensi, diri juga dipandang sebagai sebuah proses sebagaimana diyakini penganut Interaksionisme Simbolik. Dalam perspektif ini, diri didefinisikan sebagai sistem perspektif yang terus berubah dan terus terbentuk di dalam komunikasi dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri (Wood, 2008:185). Dengan kata lain, diri dikonstruksi secara sosial melalui komunikasi sehingga diri kita merupakan hasil dari bagaimana orang lain berbicara dan memperlakukan kita serta dari bagaimana kita melihat diri kita (Pearson, *et.al*, 2006:48). Setiap individu dipandang terus berkembang dan berubah dalam rangka merespon pengalaman di sepanjang hidupnya.

Perspektif Interaksionisme Simbolik yang meyakini diri merupakan sebuah proses berangkat dari pemahaman bahwa setiap individu (manusia) dianggap mempunyai diri. Baik Cooley maupun Mead yakin bahwa diri muncul karena komunikasi, tanpa bahasa diri tidak akan berkembang (Mulyana, 2008:77). Melalui bahasa yang merupakan simbol-simbol signifikan itulah individu mampu menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri. Mead menyebut subjek (diri yang bertindak) sebagai "*I*" sedangkan objek (diri yang mengamati) disebut sebagai "*Me*" (West dan Turner, 2008:105). Dalam bahasa Beebe *et.al* (1996:44) dualisme peran tersebut muncul karena setiap individu (manusia) dipandang mempunyai *self* - *reflexiveness*, yaitu kemampuan manusia

dalam memikirkan apa yang sedang dilakukan saat ia melakukannya. Perlu diketahui bahwa ketika individu (manusia) menggunakan dan memaknai simbol-simbol signifikan (terutama bahasa), di situlah ia mengembangkan pikirannya (*mind*). Kemampuan untuk menggunakan dan memaknai simbol-simbol signifikan didapatkan melalui interaksi sosial.

Individu dipandang mempunyai diri yang terdiri atas "*I*" dan "*Me*", sehingga ia diyakini mempunyai mekanisme untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri yang kemudian menuntun sikap dan perilakunya (West & Turner, 2008:100). Mekanisme untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri dapat dipandang sebagai sebuah proses komunikasi intrapersonal yang di dalamnya terdapat pula percakapan di dalam diri sendiri. Bagi Mead, percakapan di dalam diri sendiri ini diistilahkan sebagai pemikiran (*thought*) (West & Turner, 2008:103). Oleh karenanya Mead meyakini bahwa diri bukan sekedar berasal dari pemikiran sendiri yang sederhana. Diri berasal dari pemikiran yang Individu dipandang mempunyai diri yang terdiri atas "*I*" dan "*Me*", sehingga ia diyakini mempunyai mekanisme untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri yang kemudian menuntun sikap dan perilakunya (West & Turner, 2008:100). Mekanisme untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri dapat dipandang sebagai sebuah proses komunikasi intrapersonal yang di dalamnya terdapat pula percakapan di dalam diri sendiri. Bagi Mead, percakapan di dalam diri sendiri ini diistilahkan sebagai pemikiran (*thought*) (West & Turner, 2008:103). Oleh karenanya Mead meyakini bahwa diri bukan sekedar berasal dari pemikiran

sendiri yang sederhana. Diri berasal dari pemikiran yang kompleks yang melibatkan pembicaraan dengan diri sendiri (mekanisme komunikasi intrapersonal). Salah satu aktivitas penting yang dihasilkan melalui pemikiran adalah pengambilan peran (*role taking*) (West & Turner, 2008:104). *Role taking* berarti membayangkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan memandang segala sesuatu melalui perspektif orang lain (Mulyana, 2008:75). Melalui *role taking* inilah individu membentuk gambaran dan penilaian atas dirinya yang disebut sebagai konsep diri.

Pada dasarnya, *role taking* merupakan penjabaran diri sosial (*social self*) yang dikemukakan James dan pengembangan dari teori Cooley tentang diri (Mulyana, 2008:75). Melalui konsep *looking glass self*, Cooley mengemukakan bahwa "„, you would look at the image of yourself that others reveal to you through the way they treat you and react to you" (DeVito, 2004:63). Konsep ini berarti bahwa setiap diri kita memiliki kemampuan untuk melihat diri kita sendiri sebagaimana diri kita dilihat oleh orang lain (West & Turner, 2008:104). Hal ini berarti bahwa setiap diri kita menjadi subjek dan objek persepsi sekaligus (Rakhmat, 2004:99). Lebih jauh, *looking glass self* (cermin diri) juga dipandang sebagai *reflected appraisal* (pantulan penilaian) sebagaimana diyakini oleh beberapa ahli seperti Gecas dan Burke, Ichiyama, Milkie (West & Tuner, 2008:104). *Reflected appraisal* yang merupakan persepsi kita tentang bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita, diyakini sebagai salah satu asal pengetahuan diri (Taylor, *et.al*, 2009:122). Terkait dengan hal ini, Wood (2008:187) menegaskan

bahwa proses *looking glass self* ataupun *reflected appraisal* merupakan proses awal bagaimana seseorang membentuk konsep diri. Berpijak pada pandangan Mead, ia menekankan bahwa diri berangkat dari orang lain, yaitu dari pandangan orang lain tentang diri kita. Dengan kata lain, kita melihat diri kita diawali dari perspektif orang lain.

Pembahasan tentang keterkaitan diantara kultur dengan diri (*self*) yang mencakup pula konsep diri, menjadi penting dalam penelitian ini. Pembahasan ini dihadirkan sebagai bentuk pengayaan sudut pandang terhadap upaya memahami perubahan konsep diri yang terjadi pada para Anggota DPD - RI di balik adaptasi serta interaksinya dalam memaknai komunikasi antarbudaya. Dan bagaimana bila semua faktor ini berada dalam lingkup budaya kolektifis sebagaimana slogan “*Bhineka Tunggal Ika*” yang menjadi ‘Payung’ para Anggota DPD – RI / MPR - RI.

Komunikasi Antarbudaya

Untuk memahami interaksi antarbudaya, menarik menyimak apa yang diuraikan oleh Richard E. Porter dan Larry A. Samovar dalam buku Jalaluddin Rakhmat dan Deddy Mulyana (1996:11-35) mengenai suatu pendekatan terhadap komunikasi antarbudaya.

Pendekatan yang digunakan ini fokus pada pemberian makna kepada perilaku. Pemberian disini berarti memberikan makna yang telah dimiliki kepada perilaku yang akan diobservasi. Berbagai makna yang ada selama ini sebagai akibat dari pengaruh budaya sebagai hasil dari pengalaman – pengalaman pribadi dalam budaya tersebut. Makna adalah relatif bagi masing – masing *personal*, oleh karena masing – masing *personal* adalah seorang manusia yang unik dengan latar belakang dan pengalaman –

pengalaman yang unik dan berbeda - beda. Ketika seseorang mengamati suatu perilaku dalam suatu lingkungan, maka menarik bila orang tersebut ‘melihat’ kepada perbendaharaan makna yang unik dan seseorang biasanya akan cenderung memilih makna yang diyakininya sebagai makna yang paling pantas bagi perilaku yang diamati dalam konteks sosial dimana perilaku tersebut terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Vera Hermawan (2019) sebagai berikut : “Proses pewarisan tradisi nilai – nilai budaya dari tokoh adat terhadap generasi muda dalam mengkonstruksi nilai – nilai budaya berdasarkan keyakinan yang kuat terhadap agama Islam sebagai dasar dari tumbuh berkembangnya budaya yang mewarnai segala aspek kehidupan di Kampung Mahmud”. Bahwa interpretasi tokoh adat dan generasi muda dalam memaknai perkembangan zaman terhadap nilai – nilai budaya akan mengalami perubahan dari fase ke fase, mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memaknai kehidupannya terhadap keadaan geografis yang berubah. Hal ini berlangsung secara situasional.

Konsep manusia antarbudaya dikemukakan oleh William B. Gudykunst dan Young Yun Kim dalam buku mereka, *Communicating with Strangers : An Approach to Intercultural Communication* (1984:229-235). Menurut Gudykunst dan Kim, manusia antarbudaya adalah orang yang telah mencapai tingkat tinggi dalam proses antarbudaya yang kognisi, afeksi, dan perilakunya tidak terbatas, tetapi terus berkembang melewati parameter – parameter psikologis suatu budaya. Ia memiliki kepekaan budaya yang berkaitan erat dengan kemampuan berempati terhadap budaya tersebut (dalam Rakhmat & Mulyana, 1996:233).

Adler berpendapat (dalam Rakhmat & Mulyana, 1996:233), “Identitas manusia multibudaya tidak berlandaskan pada ‘pemilikan’ yang mengisyaratkan memiliki atau dimiliki budaya, tetapi berlandaskan pada kesadaran diri yang mampu bernegosiasi tentang rumusan – rumusan realitas yang baru ,, Ia tak seutuhnya merupakan bagian atau pun sama sekali terpisah dari budayanya; alih – alih, Ia berada di perbatasan.”

Masalah utama dalam komunikasi antarbudaya ialah kita cenderung menganggap budaya kita adalah suatu kemestian, tanpa mempersoalkannya lagi (*taken for granted*), dan karenanya kita menggunakannya sebagai standar untuk mengukur budaya - budaya lain (Jennifer Noesjirwan, dalam Rakhmat dan Mulyana, 1996:178).

Komunikasi antarbudaya (*intercultural communication*) adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya (Mulyana, 1996). Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, kelompok ras, atau komunitas bahasa, komunikasi tersebut disebut komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh aktivitas komunikasi yaitu apa makna pesan *verbal* dan *non - verbal* menurut budaya - budaya bersangkutan, apa yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya (*verbal* dan *non - verbal*), dan kapan mengkomunikasikannya. Menurut Deddy Mulyana (1996:237), “Manusia antarbudaya bukanlah suatu status (*being*), melainkan suatu proses menjadi (*becoming*). Ia bukanlah suatu keadaan, melainkan suatu pencarian”.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian kualitatif atau perspektif subjektif dengan tradisi fenomenologi, keterlibatan peneliti berbau dengan subjek penelitian mutlak dilakukan. Penelitian semacam ini menginginkan peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan berinteraksi dengan para informan agar dapat mengungkapkan, memahami dan menganalisis data yang mereka konstruksi dalam tindak komunikasi yang mereka lakukan. Dengan demikian, peneliti dapat mengungkapkan dan menganalisis realitas fenomena komunikasi yang mereka konstruksi dari perspektif informan.

Mengacu pada pendapat Clark Moustakas (1994:114), di dalam penelitian fenomenologi umumnya dilakukan wawancara yang panjang dan mendalam sebagai upaya mengumpulkan data. Selain wawancara, untuk mengumpulkan data dapat juga dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan analisis dokumen, sebagaimana di kemukakan Kuswarno (2009:35) dengan merujuk pada pendapat Cresswell yaitu, “metode pengumpulan data yang paling dasar dalam penelitian fenomenologi meliputi wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen”.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada para informan sebagai data utama. Di samping itu, dilakukan pula observasi partisipasi dan studi dokumen sebagai data pelengkap yang akan diarahkan untuk memperkuat data utama.

Untuk mencapai tujuan analisis tersebut, dilakukan beberapa tahap. *Pertama*, penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca, diinterpretasikan dan mampu memberikan kejelasan makna dari setiap gejala yang diamati. Pada bagian ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan pola

motif pikiran dan tindakan para informan. Maka ada data berdasarkan kriteria motivasi informan menjadi Anggota DPD – RI, ada data bagaimana adaptasi serta interaksi saat informan sebagai Anggota DPD – RI. Setelah itu, semua data tersebut dikategorisasikan berdasarkan materi atau tema utama penelitian ini, yaitu keterkaitan dengan komunikasi antarbudaya.

Kedua, reduksi data. Berdasarkan tipologi data pada tahap pertama, tahap ini dilakukan pemilahan data yang relevan dan yang dapat menjawab masalah penelitian. Proses ini dilakukan secara simultan mulai dari tahap pengumpulan data, analisis hingga sampai pada penulisan laporan penelitian. Cara yang dilakukan dengan menelusuri tema utama, membuat ringkasan dan mengungkapkan alur data.

Ketiga, penyajian data. Tahap ini dilakukan penyajian data berdasarkan tipologi. Setiap datum yang berada dalam satu tema dibuat dalam satu kelompok

No.	Inisial Nama	Inisial Propinsi	No. Anggota	Jenis Kelamin
1	BS	B	B – 27	Laki – laki
2	SY	JB	B – 47	Laki – laki
3	M	A	B – 4	Laki – laki
4	MU	R	B – 15	Perempuan
5	TBM	A	B – 2	Laki – laki
6	TAB	A	B – 1	Laki – laki
7	WI	PB	B – 128	Laki – laki

tertentu. Dengan demikian, setiap sajian data berada pada kesatuan tema secara khusus yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Keempat, melengkapi data. Pada tahap ini dilakukan *recheck* secara cermat terhadap data yang berada pada suatu tema khusus untuk mengetahui data yang sudah lengkap dan yang masih memerlukan tambahan. Data dianggap lengkap apabila sudah jenuh, terjadi kesesuaian makna antar data. Kegiatan ini berlangsung selama penelitian.

Kelima, menyusun laporan penelitian. Pada tahap terakhir ini dilakukan sinkronisasi antar bagian dalam satu bab yang sama, dan antar bab yang merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, laporan ini dihasilkan melalui proses *circle*.

III. Hasil dan Pembahasan

Profil Informan

Informasi tentang Anggota DPD – RI / MPR – RI disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Data Informan

Latar Belakang Informan

Pada dasarnya, pengalaman para informan dalam menjalani pekerjaan sebagai Anggota DPD - RI tidaklah terlepas dari kehidupan yang mereka jalani sebelumnya. Sebagaimana akan dijelaskan, masing - masing informan di dalam penelitian ini berangkat dari latar belakang yang berbeda, apabila dilihat dari faktor keluarga; lingkungan; status sosial perspektif politik; maupun kultur yang melekat pada para informan, baik secara homogen maupun heterogen.

Sudut pandang atas kehidupan yang dijalani ke – 7 (tujuh) informan sebelum menjadi Anggota DPD - RI tidak terlepas dari berbagai kondisi diri yang mereka tunjukkan, baik yang berwujud perilaku maupun non - perilaku. Hal ini terjadi mengingat sudut pandang atas kehidupan tersebut merupakan makna yang dibangun para informan atas kehidupan yang mereka jalani.

Peneliti dalam hal ini juga melakukan wawancara dengan orang – orang dekat informan (*significant others*), untuk melengkapi materi mengenai sejarah hidup informan saat belum menjadi Anggota DPD - RI. Pada konteks ini, peneliti melakukan pembicaraan dengan asisten pribadi dan staf

ahli masing – masing informan di Kompleks Parlemen Senayan dan sekitar. Tentu saja peneliti telah *cross – check* dahulu apakah mereka yang termasuk kategori *significant others* ini, memang telah berada di sekitar informan pada kurun waktu yang ditentukan.

Berikut kutipan wawancara dengan Eko, Asisten Pribadi informan B - 27 terkait hal tersebut :

“Aah ,, Abang (peneliti) bukannya udah tau? Tapi ok lah gak apa – apa aku kasitau. Bapak (informan) kemana – mana saat kampanye atau ngga’, rumah dan kantor di Bengkulu tu, tiap ruangan ada bendera dengan apa tu namanya ,, lambang – lambang daerah Bengkulu. Keq sarung yang motif Bengkulu tu, dilipat rapi, terus di tempel di dinding. Cinta betul Bapak sama Negara ini dengan budayanya Bang. Intinya itu.” (Eko Prasetyo).

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Iwan Koesnadi, pada periode jabatan di 2004 – 2009 silam, ia yang menjadi asisten pribadi informan. Tetapi sejak periode jabatan 2009 – 2014 ia menjadi staf ahli informan merangkap staf daerah di rumah aspirasi DPD – RI di Kota Bengkulu. Pertemuan ini peneliti manfaatkan untuk menanyakan hal – hal yang relevan sembari minum kopi, kami bernostalgia dengan berbicara tentang periode jabatan yang lalu di *cafe* DPD – RI, yang letaknya persis di sebelah sekretariat Propinsi Bengkulu. Saat peneliti menanyakan tentang kondisi diri informan sebelum menjadi Anggota DPD - RI, sambil tertawa ia berkata :

“Ada – ada aja pertanyaan kau Ku. Koq baru nanya sekarang? BS tu (*significant others* ini memang kerab menyebut informan dengan inisial namanya saja, kecuali terhadap informan langsung) waktu kampanye jarang lepas peci seperti Soekarno (Presiden pertama RI) dan selalu pakai sarung motif tenun Bengkulu yang dilipat di pinggang. Yang turun sampai di lutut itu. Aku pernah nanya sekali ke BS, Pak „, untuk apa berpakaian seperti ini? Beliau jawab, ya inilah jati – diri saya Wan, jati – diri yang akan diperjuangkan di Senayan bila terpilih nanti.” (Iwan Koesnadi).

Untuk informan ke – dua (B – 47) diberikan pengecualian tentang peran *significant others*, karena ketika peneliti berada di kompleks parlemen pada februari – maret 2013 silam, bertepatan ketika asisten pribadi dan staf ahli informan sedang berada di daerah pemilihan (Jawa Barat). Tugas tersebut memang ditugaskan langsung oleh informan. Hal ini peneliti ketahui karena menanyakan langsung mengenai hal tersebut kepada informan beberapa saat sebelum merekam wawancara. Peneliti beruntung karena menyangkut kajian sub – judul ini, ada beberapa pernyataan informan yang memang mengulas tentang topik – topik yang relevan dengan sub – judul ini. Dimana hal tersebut ternyata ada pada rekaman wawancara, padahal tema ini tidaklah secara khusus ada dalam pedoman wawancara. Berikut kutipannya :

“Umpamanya, ketika kampanye lalu, saya memakai sorban. Itu identitas khan? itu sangat subjektif sesungguhnya, kenapa? Untuk memberitahu “oh „, si bapak itu dari pesantren”, sebab mungkin lingkungan saya, kelompok saya dan masyarakat umum di Jawa Barat dapat mengetahui kemungkinan besar saya berasal dari kelompok pesantren. Hal ini memudahkan saya untuk mendapatkan dukungan dari mereka.” (B - 47).

Perihal informan ke – tiga (B – 4), peneliti mendapatkan informasi tentang kondisi diri informan sebelum menjadi Anggota DPD – RI, informasi yang berasal dari asisten pribadi informan, justru disaat peneliti sedang berkunjung ke sekretariat Propinsi Aceh untuk silaturahmi sembari menyerahkan dokumen penelitian untuk wawancara dan sebagainya. *significant others* yang sangat fasih berbahasa Aceh Pesisir ini, bukan hanya melihat dan ikut berperan di tim sukses informan pada pemilu legislatif 2009, tapi sudah bersama dengan informan sejak tahun 2000 silam, menurut pengakuannya. Momen ini terjadi sekitar seminggu sebelum wawancara dengan informan dilakukan. Momen ini peneliti manfaatkan untuk lebih mengakrabkan diri dan berusaha menggali sebanyak mungkin informasi darinya. Berikut petikan salah satu kalimat yang berkaitan :

“Meunyo drou tanyeueng tentang Bang Mursyid, yang jeut lon peugah adalah Bang Mursyid nyo berperangui lagee lem ke

*awak kamoe (lem perekat). Pribadi gok nyan, get that geut. Lam arti beliau lah simbol perekat awak kamoe di nanggroe. Hai ne teupe kiban keadaan bak nanggroe tanyo.”*¹(Agus Azhari).

(Kalau kamu Tanya tentang Bang Mursyid, yang bisa saya katakan adalah Bang Mursyid ini punya perangai seperti lem untuk kami. Pribadinya, sangatlah baik. Dalam arti beliau lah simbol perekat kami yang di Aceh. kamu pasti mengetahui bagaimana keadaan di negeri kita).

Ketika peneliti akhirnya dapat melakukan wawancara dengan informan, ternyata didapatkan juga hal yang menarik berkenaan dengan topik ini, berikut kutipan wawancaranya :

“Karna lon kalen tentang nyo lah, lon cuba peusanek keadaan. Lon cuba peusanek keadaan antara dua sub etnik rayeuk nyo, antara Aceh ngen Gayo. Peuken? Karna lon cinta kepada kedua etnik nyo, maka jih lon Insya Allah jeut menguasai kedua bahasa etnik nyo sertoh persen, pu nyan Bahasa Aceh, atau Bahasa Gayo.”
(B - 4).

(Karena saya lihat tentang inilah, saya mencoba

memperbaiki keadaan. Saya coba memperbaiki keadaan antara dua sub etnik besar ini, antara Aceh dengan Gayo. Kenapa? Karena saya cinta kepada kedua etnik ini, makanya saya Insya Allah bisa menguasai kedua bahasa etnik ini seratus persen, apa itu Bahasa Aceh atau Bahasa Gayo).

Keadaan agak berbeda peneliti dapatkan saat mencari informasi tentang informan ke – empat (B – 15) yang berasal dari Propinsi Riau. Alih – alih situasi formal yang dihadapi, peneliti malah sejak awal sudah memutuskan untuk menjadikan sekeretariat Propinsi Riau dan Bengkulu sebagai “*main base*” peneliti selama berada di Kompleks Parlemen Senayan. Selain tentunya ruang pos kontrol *cctv* PAMDAL (Pengamanan Dalam) di lantai dasar gedung DPD – RI. Karena untuk Propinsi Aceh, ada pergantian Anggota dan seluruh asisten. Peneliti tidak mengenal secara akrab sebagai langkah awal untuk memperoleh data penelitian. Ada hal menarik ketika pertanyaan seputar kondisi diri informan sebelum menjadi Anggota DPD – RI diajukan peneliti ke asisten pribadi B – 15, reaksi pertamanya hanyalah tersenyum sambil berdiri lalu berlalu tidak menjawab. Pertanyaan peneliti dianggap oleh *significant others* ini sebagai lelucon belaka. Ia berujar : “Jangan becanda Ku, koq dikau nanya yang beginian sekarang. Pake di foto dan direkam segala pula ooy. Irma jadi kikuk laa nie.” Tapi setelah peneliti menjelaskan tentang metode penelitian secara kualitatif, jadi ini bukan sekedar wawancara biasa, tapi nantinya materi *script interview* ini akan dibuat menjadi konstruk derajat ke – 2 untuk

tahap selanjutnya, ia setuju untuk membantu peneliti. Saat pembicaraan ini dilakukan, informan sedang dalam tugas kunker (kunjungan kerja ke daerah, tapi bukan daerah asal pemilihan. atau keluar negeri) bersama dengan Anggota DPD – RI yang lain. Biasanya agenda kunker sekitar 5 (lima) hari kerja. Perihal pandangan *significant others* yang merupakan keponakan dari informan ini mengenai sub – judul di atas, berikut kutipannya :

“Bunda tu khan *basic* - nya pendidik Ku (potongan nama peneliti). Profesi Bunda sebelum jadi DPD nie (Anggota DPD – RI) khan dosen PNS (Pegawai Negeri Sipil). Bunda khan punya yayasan pendidikan di Riau yang membiayai sekolah anak – anak yang kurang mampu secara materi tapi pintar dan punya bakat. Bunda mengabdikan seluruh hidupnya untuk yayasan ini, selain keluarga. Bukan karena Bunda sudah pensiun dari PNS baru begini, tapi sejak Irma kecil pun, Bunda udah banyak bantu orang miskin sekolah di Riau. Perkembangan budaya Melayu pun diurus Bunda. Makanya waktu kampanye calon DPD 2004 dan 2009 tu, keq ngga’ kampanye nya tim kami nie. Santai aja gak hiruk pikuk keq yang lain. Bunda bilang ke tim sukses, kita berupaya secara umum saja, lalu jangan lupa berdo’a dan berserah diri ke Allah, yang penting kita

jujur dalam berusaha. Jadi kalaulah memang sudah saatnya Bunda diberi amanah, pasti akan dikabulkan. Dan Teuku liat sendiri laa nie, kami masih disini (Senayan), ruangan Bunda pun masih sama, walau posisi Bunda malahan naik jadi nomor urut tiga.” (Irma Mutia).

Mengenai informan yang ke – lima (B – 2) menyangkut latar belakangnya tidaklah terlalu menjadi hal yang asing untuk peneliti. Beliau mempunyai nama depan yang sama dengan peneliti dan ternyata saat mengobrol secara informal di ruangan kerja informan yang ‘*notabene*’ merupakan bekas ruang kerja atasan peneliti di tahun 2004 – 2009 lalu, dengan santai informan bercerita mengenai kesehariannya sebelum menjadi Anggota DPD – RI. Ia menceritakan bahwa latar belakangnya ialah seorang pengusaha. Informan mencalonkan diri sebagai Anggota DPD – RI adalah untuk ‘berjuang’ demi nilai – nilai Aceh di tingkat nasional. DPD dipilih karena dianggap akan mampu ‘berbicara’ dari sisi lain peran legislatif pusat.

Sementara informan yang ke – 6 (enam) mengatakan, ia adalah pemberontak menurut Negara Indonesia sebelum MoU RI - GAM. Kini ia hadir di kancah nasional dengan misi untuk dapat mewakili daerahnya secara spesifik. Kesehariannya di daerah pemilihan adalah sebagai pemilik beberapa tempat usaha seperti warung kopi dan lainnya.

Terakhir informan yang ke – 7 (tujuh) adalah seseorang yang beretnik Aceh, tapi terpilih dari propinsi Papua Barat. Periode ini adalah periode kedua kalinya ia terpilih dari daerah yang sama. Selanjutnya ia mengatakan, di daerah pemilihan sehari –

hari ia berprofesi sebagai pengusaha yang berdomisili di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. Ia mendeklarasikan bahwa daerah Papua Barat adalah area yang sangat toleran terhadap unsur SARA (Suku-Agama-Ras-Antar Golongan).

Motif Informan

Informan pertama yang berhasil peneliti wawancara ialah BS, yang merupakan Anggota DPD – RI / MPR – RI (Periode 2009 – 2014) dari Propinsi Bengkulu dengan No.Anggota B – 27. Sebagai informasi tambahan, pada periode jabatan sebelumnya (2004 – 2009) informan juga merupakan Anggota DPD – RI dengan No.Anggota B – 25. Tahun 2004 silam, informan terpilih dengan suara terbanyak di daerah pemilihannya. Sedang di tahun 2009 urutannya jumlah suara informan turun menjadi nomor tiga dari empat Anggota di Propinsi Bengkulu. Hal itulah yang membuat nomor anggota menjadi berbeda. Motivasi informan untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPD - RI adalah, karena ia menyatakan tidak lagi mampu bekerja secara maksimal dalam iklim birokrasi yang monoton. Juga karena percepatan kebijakan yang dapat diambil di jajaran birokrasi tidak fleksibel (kaku) menurut informan. Kejenuhan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi diri informan. Adapun latar belakang pekerjaan informan sebelumnya, ialah di Kementerian Pekerjaan Umum, setelah menyelesaikan pendidikan teknik di Jerman. Informan juga pernah menjabat sebagai salah satu komisaris di PT.Jasa Marga, Tbk. Berikut kutipan wawancaranya :

“Awalnya ya itu, ketika saya menyelesaikan pendidikan saya di Jerman, sebagai birokrat

saat itu, yang saya pelajari ialah tentang infrastruktur jalan, terutama jalan tol, maka saya ketika itu, ke birokrasi artinya bekerja di Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Kementerian Pekerjaan Umum), saya ‘*mengejawantahkan*’ apa – apa yang saya peroleh di Jerman terhadap kondisi infrastruktur jalan tol di Indonesia yang pada saat itu memprihatinkan, dan sekarang juga masih sangat memprihatinkan, hal ini jadi sebuah pelajaran yang sangat berharga buat saya. ,, singkatnya, saya tidak nyaman dengan atmosfir birokrasi di berbagai kementerian dalam ruang lingkup kerja saya”.² (B - 27).

Selanjutnya informan juga menyatakan bahwa pola rekrutmen di DPD – RI yang unik, dengan kata lain dapat dikatakan kompleks bila mencermati syarat – syarat yang harus dipenuhi para kandidat. Hal ini tentu membuat para calon Anggota DPD – RI haruslah merupakan tokoh dan punya kompetensi yang spesifik di daerah pemilihannya masing - masing, bukan ‘titipan’ partai politik dan “tiba – tiba” bisa terpilih dan duduk di kursi parlemen pusat (Senayan). Hal tersebut makin meningkatkan

minat informan untuk mantap mencalonkan diri. Dalam konteks ini, ia berujar :

“Dari pola rekrutmen nya saja, berbeda dengan rekrutmen Anggota DPR RI yang melalui keputusan partai. Kalau kita lihat postur DPD - RI yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, dengan membagi kursi anggota sama banyak untuk tiap provinsi, tanpa melihat jumlah penduduk di nusantara ini. Sehingga yang terpilih adalah orang – orang atau tokoh – tokoh yang memang merupakan pilihan langsung masyarakat di daerah masing – masing”.³ (B - 27).

Dilanjutkan dengan :

“Ditambah karena di DPD ini tidak ada *bos* nya. Maksudnya, bahwa saya mengaktualisasi apa yang menjadi program saya, dapat sebeb – bebasnya tanpa ada aturan atau arahan oleh sesuatu kepentingan yang sifatnya politik,,, “. “,,, di DPD ini menjadi sebuah ruang pengabdian buat saya untuk *mengejawantah* kan apa – apa yang menjadi visi – misi saya

dan daerah pemilihan saya.” (B - 27).

Hal yang berbeda tetapi mirip secara substansial, diutarakan oleh informan kedua. Informan yang berasal dari Propinsi Jawa Barat ini mempunyai Nomor Anggota B – 47 bernama K.H. Sofyan Yahya, M.A. Ia yang kembali terpilih pada periode ke - dua (2009 – 2014) dengan suara terbanyak ketiga ini, mengungkapkan hal yang spesifik mengenai motivasinya. Informan berulang kali menyatakan ke peneliti saat wawancara dan kegiatan yang lain, bahwa ia bukan merupakan orang yang mempunyai *basic* di dunia politik, tidak menyukainya, dan tidak akan berkecimpung di dalamnya di luar konteks untuk sesuatu yang bermanfaat positif bagi orang banyak, atau “umat manusia” di Jawa Barat dan Indonesia. Adapun mengapa akhirnya mengapa informan tetap mencalonkan diri di tahun 2004 silam dan akhirnya terpilih, tidak lain karena, adanya harapan yang tinggi (*euphoria* istilah informan) akan perubahan politik dan hasilnya di Indonesia melalui lembaga DPD – RI yang lahir oleh amandemen UUD 1945 yang ke – tiga di tahun 2001. Dorongan baik moral maupun material juga informan peroleh dari keluarga, teman dan kolega untuk hal ini. Akhirnya informan memantapkan tekad untuk ‘hijrah’ ke dunia yang sama sekali asing baginya. Memperbaiki moral dan akhlak para *legislator* di Senayan Jakarta sebagai “simbol pesantren” adalah misi pribadinya, yang ternyata hingga peneliti bertemu kembali dengan informan di tahun 2013, misi itu masih tetap sama. Misi utamanya ialah menyuarakan aspirasi daerah di tingkat pusat dimana tiap – tiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda melalui fungsi dan wewenang DPD – RI menurut keyakinan

informan. Berkenaan dengan konteks ini, berikut kutipannya :

“Yang pertama saya sebenarnya tidak senang dengan politik. Jadi saya ini bukan politisi. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya berjuang masuk ke DPD dikarenakan ini lembaga Negara baru, dan ‘*euforia*’ mungkin ketika itu (2004), saya didorong oleh teman - teman. Juga dikarenakan saya berasal dari kelompok pesantren yang *notabene* mempunyai budaya atau ciri khas tertentu”. (B - 47).

Pernyataan lanjutan yang juga relevan :

“ ,,,, agar bisa mewakili pesantren lah kira – kira. Dengan harapan, saya diharapkan bisa memperbaiki moral, juga bisa mempengaruhi kebijakan – kebijakan dari parlemen pusat di Jakarta, yang kira – kira nanti ada keberpihakannya dengan daerah. Jadi saya lebih kuat atau fokus ke titik moral sebenarnya”. (B - 47).

Informan kedua ini mempunyai karakter unik sebagai Anggota Dewan yang ‘*notabene*’ bersikap formal bila berada di ruang kerja bila kedatangan tamu, yaitu ia tidak membeda – bedakan perlakuan

terhadap pihak yang datang. Paling tidak itu yang peneliti rasakan ketika diterima informan saat wawancara dilakukan. Informan juga sering mengumbar senyum saat wawancara, mata berbinar – binar memperlihatkan antusiasme yang tinggi serta fokus ke peneliti, terkadang sembari tertawa lepas bila ada materi wawancara yang merupakan ‘sentilan’ dari peneliti, tapi tidak keluar dari konteks topik wawancara.

Informan selanjutnya, peneliti belum pernah betemu dan mengenal informan ketiga asal Aceh ini sebelum wawancara dilakukan. Informan ketiga merupakan satu – satunya anggota DPD – RI (2009 – 2014) pada penelitian ini, yang bukan merupakan Anggota DPD – RI dari periode sebelumnya (2004 – 2009). Mengenai motivasi apa yang menjadi latar belakang mendaftar sebagai Calon Anggota pada 2009 lalu, ia berbicara dalam Bahasa Aceh sebagai berikut :

“Nah, lon kalen, peuken lon hayee u teugoh, kebetulan hampe siteungoh udep lon na di Aceh Pesisir, padahai sesungguh jih lon asli ureng Gayo. Aleh nyan lon kalen konflik yang na sampe uro nyo, bahwa konflik vertikal ka bereh antara Aceh ngen Republik Indonesia, sehingga damailah keadaan. Tapi ureng kaem pekaru perdamaian nyo, ngen cara peuket konflik – konflik horizontal, maksud lon antar sub – sub etnik yang ada di Aceh, pu antara Aceh ngen Gayo, Aceh ngen Tamiing dan yang la’ en.

Karna lon kalen tentang nyo lah, hai lon cuba peusanek keadaan". (B - 4)

[(Nah, saya lihat, kenapa saya ingin sekali ke 'tengah' (maksudnya ke legislatif di Senayan / parlemen pusat) kebetulan hampir setengah hidup / umur, saya berada di Aceh Pesisir, padahal sesungguhnya saya asli etnik Gayo. Setelah itu saya mengamati konflik yang ada sampai hari ini, bahwa konflik vertikal sudah selesai antara Aceh dengan Republik Indonesia, sehingga damai keadaan. Tapi orang sering ganggu perdamaian ini, dengan cara membuat konflik – konflik horizontal, maksud saya antar sub – sub etnik yang ada di Aceh, apa antara Aceh dengan Gayo, Aceh dengan Tamiang dan yang lain. Itu yang paling menarik saya amati dari masyarakat Aceh sekarang. Karena saya lihat tentang inilah, saya mencoba memperbaiki keadaan)]

Perlu kiranya peneliti jelaskan mengenai latar belakang konteks pembicaraan informan ketiga di atas, berdasarkan wawancara dan pembicaraan antara peneliti dengan informan di ruang

kerja dan sekretariat Propinsi Aceh, baik yang direkam ataupun tidak. *Pertama*, menurut informan ada beragam bahasa lokal berikut sub – etnik yang berada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun sub - etnik tersebut diantaranya ialah Aceh Pesisir; Aceh Gayo (lazim disebut dengan Aceh pedalaman); Alas; Kluet; Aceh Tamiang; Singkil; dan Aneuk Jamee (anak tamu). Informan sendiri berasal dari sub – etnik Gayo, yang artinya bukanlah merupakan sub - etnik yang dominan di Aceh, baik dilihat dari sisi jumlah penduduk atau kekuatan politik. Sub – etnik yang dominan dan mempunyai pengaruh politik; sosial; dan budaya di Propinsi Aceh ialah Aceh Pesisir *Kedua*, setelah Aceh dilanda konflik bersenjata hampir tiga puluh tahun lamanya (Tahun 1976 – 2005) dengan tensi konflik yang kerab kali turun naik tapi tidak kunjung selesai, hingga akhirnya tercapailah perdamaian antara Republik Indonesia – Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia, pada tanggal 15 agustus 2005. Peristiwa inilah yang dimaksud “konflik vertikal” telah usai oleh informan. Setelah itu keadaan di Aceh tidaklah jua dapat dikatakan damai secara utuh. Masih terjadi konflik bersenjata di mana – mana dengan modus beragam, seperti perampokan dengan senjata laras panjang atau penembakan mobil kantor atau mobil partai politik tertentu. Belum kasus – kasus penembakan senjata api serta pembunuhan terhadap tokoh politik tertentu, terutama sebelum, saat, dan sesudah pemilu legislatif diselenggarakan. Juga adanya mobilisasi massa untuk tujuan pemekaran Propinsi Aceh yang hendak dimekarkan menjadi 3 (tiga) propinsi, dimana salah satu keinginan pemekaran tersebut justru berasal dari daerah asal informan. Menurut informan, keadaan ini sengaja diciptakan untuk memecah - belah daerah Aceh yang sangat ia cintai, dan ia tidak rela akan hal ini dan merasa harus berbuat sesuatu, tidak bisa diam

berpangku tangan saja di Aceh, tapi aspirasi ini harus disuarakan dari Jakarta (pusat pemerintahan). “Rantai Komando” itu harus bisa diikuti, dipahami, dan diproses bersama, demikian kutipan pembicaraan dari informan yang tidak masuk dalam rekaman wawancara. Ke – 2 (dua) hal ini lah yang menjadi motivasi utama informan ingin menjadi Anggota DPD – RI.

Atmosfir kekeluargaan juga peneliti rasakan tatkala bertemu dengan informan selanjutnya asal Propinsi Riau ini. Saat peneliti kembali bertemu dengan informan setelah lebih 5 (lima) tahun tidak bertemu, refleks peneliti menyapa informan dengan kata “Bu”, dan langsung di sanggah informan sambil tersenyum dengan kalimat : “Panggil dengan Bunda aja Nak, macam dulu”. Selanjutnya peneliti takjub karena menyaksikan sendiri bagaimana informan yang sudah berumur sekitar 76 tahun saat wawancara dilakukan, tetapi informan masih sangat gesit untuk seseorang yang mempunyai aktivitas sebagai Anggota Parlemen yang padat, mungkin dikarenakan memang sudah terbiasa demikian bila melihat rekam jejak perjalanan hidup informan. Lalu pada konteks motivasi apa yang melatarbelakangi informan yang berlatar belakang dosen dan politisi untuk menjadi Anggota DPD - RI, berikut kutipan wawancaranya :

“Motivasi saya mencalonkan diri menjadi calon Anggota DPD - RI adalah karena terkesan dengan aturan konstitusi yang mengatur bahwa DPD - RI ini, adalah untuk menjadikan DPD - RI ini sebagai akses daerah di tingkat nasional. Kita mengetahui

sebelumnya, katakanlah daerah – daerah itu terabaikan oleh pemerintah pusat kita. Oleh sebab itu, sebagai salah satu hasil reformasi yang lalu, meminta supaya daerah itu diberi akses yang baik di tingkat pusat ini, sehingga daerah – daerah itu sebenarnya bisa berkembang, menjadi maju, rakyat daerah di seluruh Indonesia ini menjadi sejahtera. Intinya agar tujuan nasional menjadi cepat tercapai”. (B - 15).

Hasil pada tabel berikut merupakan refleksi kilas balik terhadap informan, dan gambaran secara ringkas atas berbagai hal yang terkait dengan latar belakang masing - masing informan yang dijadikan motif, dimana akhirnya mereka memutuskan untuk mendaftar menjadi Calon Anggota DPD – RI, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 2.2. Motif Informan Menjadi Anggota DPD – RI / MPR -RI

Informan (No. Anggota)	Model Konsep Diri	Keterangan
B – 27	Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Informan merasa hubungan antara percepatan kebijakan yang diambil dengan realisasi program di lapangan tidak sesuai • Di DPD – RI informan bisa mengaktualisasikan program pribadi dan daerah dengan fleksibel tanpa kuatir intervensi / pengaruh politik
B - 47	Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Ingin mewakili kaum pesantren di Senayan • Berharap bisa memperbaiki moral dan akhlak <i>legislator</i> menjadi lebih baik

		<ul style="list-style-type: none"> • Bisa mempengaruhi kebijakan parlemen pusat untuk lebih berpihak kepada daerah
B - 4	Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kuatir atas konflik horizontal yang terjadi di Propinsi Aceh • Adanya perkembangan situasi bahwa Aceh bisa pecah / dimekarkan menjadi 3 (tiga) propinsi
B - 15	Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Agar daerah punya akses yang baik di tingkat nasional

Adaptasi Informan

Materi pada sub bab ini, spesifik tentang kemampuan adaptasi Anggota DPD – RI dalam ruang lingkup internal mereka.

Adapun beberapa kutipan wawancara yang relevan dengan pembahasan pada topik ini diantaranya :

Informan pertama (B – 27) mengatakan sebagai berikut :

“ ,, dengan itu tadi, kemajemukan budaya kita dianggap sebuah kekayaan. Maka pendekatan yang dilakukan, biasanya pendekatan yang sifatnya emosional kedaerahan. Inilah faktor pembeda antara Anggota DPD - RI dengan Anggota DPR RI, bahkan sejak dari awal proses pemilihan, hingga kami bertugas. Kami dipilih berdasarkan wilayah tanpa memperhitungkan jumlah penduduk antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kami mewakili daerah yang

notabene mempunyai etnik dan kebudayaan yang khas antara satu dengan lainnya, bukan rasio jumlah penduduk.” (B - 27).

Dilanjutkan dengan pernyataan,

“Saya misalnya, saya ini orang Jawa, mewakili Propinsi Bengkulu, yang tanda kutip mempunyai *culture* atau budaya berbeda. Dalam kerangka itu, saya harus bisa menempatkan diri saya terhadap *culture* yang akan kita bawa / wakili. Sehingga pendekatan – pendekatan yang saya lakukan lebih banyak tentang pendekatan - pendekatan tentang hal – hal yang berkenaan dengan emosional kedaerahan dan kebudayaan.” (B - 27).

Selanjutnya menurut informan ke – dua (B – 47) menjawab mengenai adaptasi yang dilakukannya, ia dengan lantang mengatakan :

“ ,, saya adalah orang yang tidak senang politik dan saya bukan anggota partai politik manapun. ,, Ya, lewat budaya. Begini, jadi sulit bagi teman – teman Papua menyampaikan pesan yang utuh dan dimengerti bagi orang Jawa Barat. Sulit juga bagi orang Jawa Barat

menyampaikan pesan bagi orang Aceh dan seterusnya. Jadi dengan budaya itu, maksud saya sentuhan budaya, dengan kesamaan budaya tadi, maka pesan – pesan atau simbol menurut anda, maka pesan – pesan Negara melalui bentuk implementasi undang – undang di daerah tertentu misalnya, akan lebih mudah disampaikan.”(B - 47).

Ia meneruskan keterangan mengenai tema ini dengan pernyataan :

“Untuk Aceh sekarang khan sedang hangat diperbincangkan di tingkat nasional mengenai simbol dan bendera daerah. Siapa yang lebih paham? Tentu Anggota DPD asal Aceh. Banyak konflik diselesaikan dengan budaya. Keuntungannya besar sekali. Intinya menurut saya, realisasi kebudayaan yang pesan – pesannya disampaikan dengan cara atau komunikasi yang baik dan tepat. Hal yang terlihat gampang, padahal kompleks urusannya tapi hasilnya luar biasa.” (B - 47).

Mengenai hal ini, informan ke – tiga (B – 4) mengutarakan hal sebagai berikut :

“Ternyata, bak DPD nyo, kamoe jeut merajut nyan mandum. Ci ne bayangkan, ngen 33 propinsi, nyo berbeda bahasa mandum, hana yang saban saboh pih. Jadi, peuken geutanyo jeut merajut persatuan nyan? Jadi sesungguhnya jih, kehadiran lembaga DPD nyo, menurut pendapat lon, justru bak lembaga nyo lah jeut sebagai pemersatu bangsa atau miniatur NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nyan mandum berkat makna NKRI yang kamoe realisasikan.” (B - 4).

(“Ternyata di DPD ini, kami bisa merajut itu semua. Coba anda bayangkan, dengan 33 propinsi, ini bahasa daerah berbeda semua, tidak ada yang sama satupun. Jadi kenapa kami bisa merajut itu semua? Jadi sesungguhnya kehadiran lembaga ini, menurut pendapat saya justru inilah lembaga yang bisa sebagai pemersatu bangsa atau miniatur NKRI. Itu semua berkat makna NKRI yang kami realisasikan”) .(B - 4).

Informan menambah keterangannya tentang topik ini dengan pernyataan sebagai berikut :

“Jadi inti jih, justru ngen DPD nyo, nyo lah elemen perekat bangsa nyo. Jadi sige lom, disino, kiban geutanyo ta hargai saboh etnik, nyo khen, geutanyo meuphom saboh budaya, nyo ken, aleh nyan geutanyo komunikasi. Justru bak tempat nyo lah lon mulai meureuno bahasa rakan – rakan propinsi la’en.”(B - 4).

(“Jadi intinya, justru dengan DPD ini, inilah elemen perekat bangsa ini. Jadi sekali lagi, disini, bagaimana kita menghargai suatu etnik, ya khan, kita pahami budaya tertentu, ya khan, kemudian kita berkomunikasi. Justru disini saya pun mulai belajar bahasa teman – teman propinsi lain”).
(B - 4).

Perihal tentang bagaimana para informan beradaptasi setelah menjadi Anggota DPD – RI, informan ke – empat (B - 15) dengan ringan menyatakan hal seperti berikut :

“Bunda memiliki budaya Melayu, nah ini menjadi perekat juga kepada yang lain. Hal itu dikenal dalam budaya Melayu sebagai

etika sopan – santunnya, tunjuk ajarnya, sikap dari yang muda umpamanya bagaimana terhadap yang tua, terhadap yang tua dihargai, yang muda disayangi, itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang diikuti oleh orang tanpa dia sadar, sudah menjadi kebudayaan yang melekat dalam diri orang Melayu.” **(B - 15).**

Selanjutnya informan menambahkan pernyataannya dengan kalimat :

“Dan simbol – simbol yang memperlihatkan kita sebagai seorang yang mempunyai ciri khas budaya dari daerahnya ialah, seperti Bunda umpamanya, bisa terlihat dari pakaian, dari cara kita bertutur, dari cara kita bergaul atau berkomunikasi dengan teman - teman, itu adalah ciri khas sebenarnya yang telah membentuk kita sejak awal, sebagaimana budaya telah membentuk bunda sebagai seseorang yang berbudaya Melayu, itu tercermin pada diri kita, tidak bisa kita bohongi, dan tidak bisa kita buat – buat, sudah terlihat dari bagaimana keseharian kita dalam

bergaul dan
 sebagainya.” (B - 15).

Tabel 1.3. Tipe Adaptasi Informan Setelah
 Menjadi Anggota DPD – RI

Penjelasan mengenai ketiga (3) jenis
 model pada tabel di atas ialah sebagai berikut
 :

Model konservatif ialah informan
 yang memiliki karakter sikap stabil dalam
 mengambil keputusan dan tindakan. Faktor
 resiko dalam keseharian baik saat sedang
 bekerja ataupun tidak, selalu menjadi salah
 satu pertimbangan utama. Kestabilan dalam
 proses hidup adalah kunci informan model
 ini dalam memaknai dan berperilaku dalam
 kesehariannya. Kata kunci untuk model ini
 ialah “*status quo*”.

Model adaptif adalah informan yang
 cenderung mempunyai karakter sikap
 fleksibel dalam berperilaku. Mencari hal –
 hal baru dalam keseharian adalah keinginan
 utama, dengan menimbang secara sederhana
 saja sebelum mengambil suatu keputusan.
 Kata kuncinya ‘transit’. Artinya informan
 pada model ini akan cenderung berperilaku
 ‘*always move on*’ tergantung bagaimana
 situasi dan kondisi saat itu.

Model interaktif ialah informan yang
 cenderung mempunyai karakter sikap yang
 cepat dalam mengambil suatu keputusan dan
 tindakan penting. Faktor keuangan dan
 resiko pekerjaan dalam hidup, dan faktor
 yang lain dalam perilaku keseharian, tidaklah
 terlalu dirisaukan. Menjadi ‘seseorang’
 dengan prestasi yang “lain daripada yang
 lain” adalah target utama model informan ini.
 Kata kuncinya ialah “hijrah dan inovasi”.

Konteks ini relevan dengan penelitian
 yang dilakukan oleh Sanusi & Sidik (2022)

dimana salah satu temuannya yang penting
 ialah : ““Masyarakat adat Kampung
 Cireundeu memercayai filosofi “*Ngindung
 Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman*”, yang
 bermakna manusia memiliki cara, ciri dan
 keyakinan masing - masing, kemudian tidak
 bertentangan dengan perubahan zaman tetapi

Informan \ Aspek	Jenis Pendekatan	Sosial / Politik / Budaya
B - 27	• Interaktif	Budaya
B - 47	• Adaptif	Budaya
B - 4	• Interaktif	Budaya
B - 15	• Adaptif	Budaya
B - 2	• Adaptif	Sosial
B - 1	• Konservatif	Politik
B - 128	• Interaktif	Sosial

mengikuti arus””. Masyarakat Cireundeu di
 Jawa Barat percaya bahwa keberlangsungan
 Cireundeu mesti berpedoman pada
 kemampuan beradaptasi terhadap perubahan
 zaman, perkembangan teknologi informasi
 mesti dapat diimbangi tanpa harus
 menghilangkan ciri dan pandangan hidup.

Interaksi Informan

Materi pada sub bab ini, spesifik
 tentang kemampuan adaptasi Anggota DPD
 – RI dalam ruang lingkup eksternal mereka,
 termasuk aktifitas para informan di masa
 reses, kunjungan kerja dan kegiatan lain yang
 mengatasnamakan jabatan yg dimaksud.

Mengenai hal tersebut, berikut
 kutipan wawancara dengan informan
 pertama (B – 27) :

“Aspek “gotong –
 royong”. Aspek
 kebersamaan, “*Tepo
 Seliro*”. Aspek “*tepo
 seliro*” itu adalah aspek
 dalam kehidupan
 dimana kita harus saling
 menghargai diantara
 umat / manusia, dari
 “*tepo seliro*” itu

nantinya akan merujuk / mengacu kepada sebuah interaksi yang akhirnya akan menjadi sebuah *sillaturrahi*. (B - 27).

Lalu informan melanjutkan dengan keterangan :

“Di Bengkulu, itu juga ada seperti hal ini, namanya ‘*Tabot*’. *Tabot* itu juga mencerminkan budaya dari Indonesia secara keseluruhan tapi lebih spesifik kepada budaya lokal, yang mengatakan “eh,,, manusia hiduplah secara bergotong – royong karena kau dilahirkan harus bisa saling membutuhkan, saling menghargai, dan saling menjaga”. (B - 27).

Mengenai bagaimana Anggota DPD – RI melakukan interaksi dalam bertugas, informan ke – dua (B – 47) tersenyum sambil mengatakan dengan santai kalimat :

“Dimana – mana kita akan punya pengaruh bila suatu hal dikerjakan secara bersama, itulah.” (B - 47).

Selanjutnya, informan menambahkan keterangan dengan ucapan :

“saya dari Jawa Barat yang *notabene* salah satu propinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, saya justru lebih banyak mengalah lho. Seseorang diharapkan

tau diri lah, dia harusnya mampu menempatkan dirinya relevan dengan konteks alam sekitar.” (B - 47).

Pertanyaan peneliti tentang hal ini ditutup melalui pernyataan :

“,,, bayangkan seseorang yang mempunyai ilmu segala macam, punya posisi atau kedudukan yang tinggi, tapi tidak tau diri, tidak bisa menempatkan diri serta potensinya, tentu akan berakibat buruk tidak hanya terhadap dirinya, tapi kepada lingkungan sekitar seseorang tersebut berada. Dalam Islam, orang tersebut jelas bukan merupakan figur yang ideal.” (B - 47).

Sementara informan ke – tiga (B – 4) menjelaskan hal ini dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Luar biasa atmosfir ini. Sampai hari ini, setiap saya berjumpa dengan teman - teman dari daerah Timur (Indonesia bagian Timur), saya selalu panggil mereka dengan sebutan ‘Kakak’. Karena mereka juga memang menjadi ‘Kakak’ buat saya. “Bagaimana kak, apa kabar kak”, begitulah kalimat - kalimat yang

saya pakai. Jadi saya telusuri kenapa bukan disebut saja nama kita? Ternyata panggilan ‘Kakak’ itu membuat ikatan emosional antara kami lebih kuat. Karena kita panggil dia dengan ‘Kakak’, maka dia pun akan panggil kita dengan ‘Kakak’. tapi kalau kita panggil dia dengan nama, dan sebaliknya, itu seolah – olah ada ‘jarak’.” (B - 4).

Pertanyaan peneliti mengenai hal ini ditutup informan dengan kalimat yang berkonteks analogi situasi sebagai berikut :

“Ya, nyan. Jadi, balek u substansi unsur peusaboh buno khen? Jadi, hana perle lee peuset “Jong Java, Jong Sumatera” dan seterus jih, ooh betui – betui hana perle lee. Nyo lah Jong 33 propinsi. Ha ha ha ,,,, lage nyan khen, nah nyo ka panyang that lon caritra.” (B - 4).

(Ya, itu dia. Jadi, kembali khan tentang substansi unsur perekat tadi khan? Jadi tidak perlu lagi dibuat “Jong Java, Jong Sumatera” dan sebagainya, ooh tidak perlu lagi. Inilah Jong 33 propinsi. Ha ha ha ,,,, begitu khan, nah

ini sudah panjang betul saya cerita). (B - 4).

Adapun pernyataan informan ke – empat (B – 15) dalam konteks ini ialah :

“Bunda memiliki budaya Melayu, nah ini lah yang menjadi perekat juga kepada yang lain.” (B - 15).

Dilanjutkan dengan kutipan wawancara berikut :

“Alhamdulillah kalau Bunda disini bergaul dengan teman – teman itu, dari seluruh Indonesia, dari etnis mana saja, dari yang berbeda agama umpamanya, yang berbeda suku dan lain sebagainya, kita merasa sama. Rasanya dekat, Bunda rasanya dekat dengan kawan – kawan itu, kita sama.” (B - 15).

Tabel 1.4. Kategori Interaksi Informan Sebagai Anggota DPD - RI

Informan	Tipe Interaksi	Keterangan
B – 27	Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • “<i>tepo seliro</i>”, maknanya untuk saling menghargai dan sillaturahmi
B – 47	Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap Rendah Hati • Potensi Diri Sesuaikan Dengan Lingkungan
B – 4	Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Mengeksplorasi Berbagai Budaya Anggota DPD – RI Lainnya (Keperluan)
B - 15	Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Publik Tidak Asing Dengan Budaya Melayu
B – 2	Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • DPD – RI Adalah ‘Sekolah’ Berbagai Budaya di Indonesia
B – 1	Konservatif	<ul style="list-style-type: none"> • Representasi Budaya Yang Klasik Idialis

B – 128	Interaktif	• Merasa Sebagai Wakil Dari 2 Etnik dan Budaya Yang Berbeda
---------	------------	---

menarik bila disimak beberapa kutipan wawancara para informan yang relevan dengan hal tersebut. Berikut kutipannya :

Informan pertama (B – 27) mengatakan,

“ ,, itu sangat penting. Jadi, itu sebuah marwah / jati diri bangsa, yang sekarang mungkin sudah agak luntur, hal itu ditentukan dari seberapa besar marwah / jati diri tadi melekat pada penghuni republik ini. Jati diri bangsa, hal ini juga terkandung dalam kemajemukan budaya Indonesia. Menurut pendapat saya, *cultures* inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita. karena untuk orang - orang asing, baik yang berada di dalam atau di luar Indonesia, justru mereka akan melihat kemajemukan – kemajemukan pluralisme inilah, yang akan menentukan jati diri Bangsa Indonesia di ‘mata’ mereka.”(B - 27).

Juga pernyataan berikut,

“Saya berpikir, *cultures* tidak hanya berupa ‘imunisasi’. karena dari *cultures*, itu juga bisa menjadi acuan dari jati diri masing – masing

individu yang *basic* atau mendasar, bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara melalui warna – warni budaya kita. ,, Itulah pentingnya substansi implementasi *cultures*. Hal ini bisa kita maknai dan menurut saya tercermin ke dalam ideologi kita Pancasila.”(B - 27).

Informan ke – dua (B - 47) menyampaikan,

“Hal itu (*cultures*), menurut saya adalah materi kekayaan sebenarnya. Kekayaan bangsa yang sudah diakui dalam Pancasila sekalipun. Anda tentu tau semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Dan keanekaragaman itu, menurut orang pesantren seperti saya, hal itu adalah rahmat dari Allah SWT, indah sekali.”(B - 47).

Dan ia menambahkan keterangannya dengan kalimat,

“ ,, Saya kasi contoh, pada periode pertama saya menjadi DPD (2004 – 2009), era - nya Almarhum Pak Helmi Al Mujahid (atasan peneliti saat itu), saya di komite I DPD (saat itu bernama *Ad Hoc I*), dalam satu pertemuan

antara kami (Anggota DPD - RI Komite I) dengan 11 (sebelas) profesor yang diundang untuk berkeliling Indonesia, semua dari 11 profesor tersebut selalu berbicara budaya di tiap tempat yang kami singgahi.

Pertanyaannya, siapa yang paling berbudaya? Kami? Para profesor? Para muspida (aparatur terkait yang berwenang di daerah tujuan) yang menyambut kami? Masyarakat disana? Atau siapa? Jawabannya ternyata, ini menurut pendapat saya, ialah masyarakat yang mempraktekkan di lapangan dengan baik apa yang menjadi kebudayaan mereka, tanpa mengetahui banyaknya peraturan tertulis yang mengatur tentang itu.” (B - 47).

Informan melanjutkan dengan mengatakan,

“,, ada nilai yang paling penting menurut saya ya Teuku, ‘Tasamu’ istilahnya. ‘Tasamu’ itu dalam bahasa Arab, menurut bahasa Indonesia artinya toleran. Saling menghargai kira – kira dalam prakteknya. Sunda itu budayanya tidak keras, lunak. Jadi.

Kami masih bisa mendengarkan pihak lain dengan baik lebih dahulu. Anda perhatikan dari musiknya saja, ada Cianjuran, ada degung, ada angklung dan sebagainya, tidak ada kha yang dominan keras dalam keseluruhannya? Hal ini melambungkan sesungguhnya menurut saya, ialah watak dan kepribadian orang Sunda. Jadi, orang Sunda seperti itu karakternya menurut saya. Nah ... menurut saya, budaya apapun bagus, kalau diletakkan pada tempatnya. Makanya di dalam Islam, semuanya tidak ada yang jelek. Maksud saya, yang jelek itu bukan pada materinya, tetapi pada penempatannya. Jadi, baik atau tidaknya penilaian seseorang pada suatu hal, ditentukan oleh penempatan materi tersebut.” (B - 47).

Sementara pernyataan informan ke – tiga (B – 4) perihal makna identitas etnik ialah :

“ ,, begini, kalau kita menghargai budaya seseorang, dia akan cenderung cinta kepada kita. Ya, apalagi bila kita mau memakai budaya orang tersebut,

berarti kita ini bahagian dari mereka. Maka contohnya saja disini, kalau kami kunjungan kerja ke daerah, saya memakai pakaian batik khas daerahnya, kalau saya ke Kalimantan, saya diberi batik khas Kalimantan, kalau teman DPD ada yang ke Aceh, diberikan batik khas Aceh dalam bentuk pintu Aceh, paling tidak diberikan topi khas Aceh, untuk mereka pakai.”(B - 4).

Saat peneliti menyakan ke informan perihal perspektifnya mengenai manifestasi identitas etnik, bagaimana implementasi yang ideal menurut informan, ia melanjutkan dengan kalimat :

“Firman Allah (Informan langsung membaca Bismillah dan Ayat Suci Al – Qur’an), kalau saya tidak silap ini Surat Al – Hujurat Ayat 13. Artinya (menurut informan tanpa peneliti bandingkan dengan teks terjemahan Al – Qur’an), Wahai manusia, Akulah yang menciptakan kamu dari laki – laki dan perempuan. Dan Ku ciptakan kamu bersuku – suku, berpuak – puak, dan berbangsa – bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi – Ku adalah orang yang

paling bertaqwa diantara kamu. Jadi bukan suku yang disebut. Bukan Aceh yang paling mulia, bukan Gayo yang paling mulia, bukan Jawa, Padang, Batak dan sebagainya, tidak, tapi siapa yang paling bertaqwa diantara kamu. Surat Al Hujurat ayat 13 ini justru memotivasi saya, artinya kenapa pekerjaan di DPD ini saya lakukan? Karena mengimani ayat tersebut. Ya khan, justru yang saya rasakan dengan mengimani ayat itu, memahami ayat itu, kemudian mengaplikasikan ayat itu, justru rasa keagamaan saya jadi lebih kental.”(B - 4).

Informan ke – empat (B - 15) sangat antusias saat tema tentang budaya ditanyakan peneliti. Berikut kutipan wawancaranya :

“Setiap daerah itu memiliki budaya, dan setiap budaya itu di masing – masing daerah memiliki ciri khasnya. Maka, gabungan keseluruhan budaya – budaya itu memperkaya budaya nasional. Jadi budaya yang ada pada setiap daerah itu, adalah merupakan suatu ee ,, ibarat pelanginya. Jadi berwarna – warni, bermacam – macam

tetapi budaya kita akan menjadi indah.”(B - 15).

Tidak berhenti sampai disitu, informan melanjutkan pernyataannya untuk tema ini dengan kalimat yang sedikit heroik sebagai berikut :

“Saya memaknai identitas etnik sangat positif sekali, bahwa seluruh budaya – budaya kita itu adalah indah, warisan dari leluhur kita dahulu yang ada pada setiap daerah, itu bagus sekali. Identitas etnik adalah salah satu warna pada pelangi tadi. Dengan komunikasi antarbudaya ini menjadi perekat persatuan Bangsa Indonesia. Begitu saya memaknainya, oleh sebab itu ini perlu kita pelihara, ya budaya itu perlu kita pelihara, komunikasi antarbudaya itu perlu kita pelihara, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang ber’*marwah*’, bermartabat, dan akan dihargai oleh bangsa – bangsa lain.” (B - 15).

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat ialah ruang lingkup konsep diri informan tidak terbatas pada komunikasi sosial dan politik saja, tetapi berkaitan erat dengan komunikasi antarbudaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga (3) model konsep diri

para informan, yaitu : model konservatif; adaptif; dan interaktif.

Slogan “Bhineka Tunggal Ika”, menjadi simbol komunikasi antarbudaya (payung) para informan penelitian sebagai hasil akhir dari cara mereka memaknai konsep dirinya.

Para informan berusaha untuk dapat menyampaikan ‘Pesan’ bahwa Lembaga Negara yang Bernama DPD – RI adalah satu organisasi yang “Mewakili Aspirasi” daerah di ibukota Negara RI dalam konteks budaya – sosial – politik, berbeda tugas, wewenang dan fungsi dengan Lembaga DPR - RI.

Daftar Pustaka

- Bajari, A. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi : Prosedur, Tren dan Etika*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya : Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*. Terjemahan Nining I. Soesilo. Jakarta : UI Press.
- Bogdan, Robert & Taylor, Steven J. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Arief Furchan. Surabaya : Usaha Nasional.
- Burns, R. 1993. *Konsep Diri : Teori, Pengukuran, dan Perilaku*. Jakarta : Arcan.
- Calero, H. Henry. 2005. *The Power of Nonverbal Communication : How You Act Is More Important Than What You Say*. Los Angeles : Silver Lake Publishing.
- Cresswell, W. John. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*. California : SAGE Publications, Inc.

- _____. 2002. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. Terjemahan KIK UI dan Nur Khabibah. Jakarta : KIK Press.
- Denzin, K. Norman, & Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan : Dariyatno dkk. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Denzin, K. Norman. 1992. *Symbolic Interaction And Cultural Studies : The Politics of Interpretation*. U.K : Blackwell Publishing.
- DeVito, Joseph. 1997. *Komunikasi Antar Manusia*. Terjemahan Agus Maulana. Jakarta : Profesional Books.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- _____. 1990. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek, Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (red). 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia*. Jakarta : FORMAPPI dan AusAID.
- Griffin, Em. 1991. *A First Look at Communication Theory*. New York : McGraw-Hill Companies.
- Gudykunst, William B. (Ed). 2005. *Theorizing about Intercultural Communication*. Thousand Oaks : Sage Publications.
- Hermawan, Vera. (2019). Komunikasi Pewarisan Budaya Masyarakat Adat Kampung Mahmud. **LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 55-73, Juli 2019. P-ISSN 2614-0381, E-ISSN 26140381.
- Kelompok DPD di MPR RI (red). 2006. *Untuk Apa DPD RI*. Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI.
- Koentjaraningrat. 1971. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djembatan.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi : Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Liliweri, Alo. 2003. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta : LKiS.
- _____. 2003. *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Littlejohn, W. Stephen. 2005. *Theories of Human Communication : Eight Edition*. Belmont California : Wadsworth Publishing Company.
- Lull, James. 1998. *Media, Komunikasi, Kebudayaan : Suatu Pendekatan Global*. Terjemahan A. Rahman Abadi. Jakarta : Obor Indonesia.
- Martin, N. Judith & Nakayama, K. Thomas. 2010. *Intercultural Communication In Contexts. Fifth Edition*. New York : McGraw – Hill Companies Inc.
- Miller, Katherine. 2001. *Communication Theories : Perspectives, Processes, and Contexts*. United States of America : The McGraw-Hill Companies.
- Mulyana, Deddy. 2012. *Cultures And Communication : An Indonesian Scholar's Perspective*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. 2001. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. 1999. *Nuansa-nuansa Komunikasi : Meneropong Politik dan*

- Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. 2004. *Komunikasi Populer : Kajian Komunikasi dan Budaya Kontemporer*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- _____. 2004. *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____, & Rakhmat, Jalaluddin (editor). 1996. *Komunikasi Antarbudaya : Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*. United States of Amerika : SAGE Publications, Inc.
- Neulip, James W. 2006. *Intercultural Communication : A Contextual Approach*. California : Sage Publication, Inc.
- Piliang, Indra J. & Legowo, T. A. 2006. *Disain Baru Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (red). 2005. *Pemantauan Proses Legislasi : Panduan Praktis*. Jakarta : PSHK.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Samovar, Larry A. Porter, Richard E. & McDaniel, Edwin R. 2007. *Communication Between Cultures. USA* : Thomson Wadsworth.
- Sekretariat Jenderal MPR RI (red). 2004. *Dewan Perwakilan Daerah : Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.
- Sanusi, Nunung & Sidik, A. Permana. (2022). Komodifikasi Keunikan Kampung Adat Cireundeu Sebagai Obyek Wisata Budaya. **LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI**, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 76-82, Januari 2022. P-ISSN 2614-0381, E-ISSN 26140381.
- Schutz, Alfred. 1972. *The Phenomenology of The Social World*. Translated by George Walsh and Fredrik Lehnert. London : Heinemann Educational Books.
- West, Richard & Turner, H. Lynn. 2008. *Introducing Communication Theory : Analysis and Application 3rd*. Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Buku-1. Jakarta : Salemba Humanika.
- _____. 2008. *Introducing Communication Theory : Analysis and Application 3rd*. Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Buku-2. Jakarta : Salemba Humanika.
- Wood, Julia T. 2008. *Communication Mosaics : An Introduction to The Field of Communication*. Belmont : Thomson Wadsworth.